Ocean Engineering: Jurnal Ilmu Teknik dan Teknologi Maritim
Volume 5, Nomor 2, Juni 2026
E-ISSN: 2963-5454; p-ISSN: 2963-5012, Hal. 304-311
DOI: https:/doi.org/10.58192/ocean.v5i2.4982
Tersedia: https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/ocean

Proses Penerbitan Sertifikat Kapal Berbendera Marshall Island untuk Persyaratan *Crew on Board* pada PT. Korin Global Mandiri

Debi Aprilia Daniel[1*], Jumriani[2], Abdul Rahman[3]
[1-3] Department of Port and Shipping Management, Politeknik Ilmu Pelayaran, Indonesia
**Penulis Korespondensi: debyaprilia02@gmail.com*

Abstract. *This study aims to analyze the Marshall Island certificate issuance procedure, identify the obstacles encountered, and determine the company's efforts to overcome these obstacles to ensure smooth crew onboard placement. The research employed a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, interviews, and documentation studies at PT. Korin Global Mandiri. The results indicate that the Marshall Island certificate issuance procedure is implemented through several stages, namely crew recruitment, document collection, document verification, selection of the form (MI-105 for officers and MI-273 for ratings), form completion, document upload to the International Registries Inc. (IRI) system, verification by the Republic of the Marshall Islands (RMI), and certificate issuance. The main obstacles identified include incomplete crew documents, inconsistencies in identity data, delays in document processing, and lack of crew discipline in submitting documents. To address these issues, the company conducts document rechecking, coordinates intensively with crew members, provides submission reminders, and monitors the certification process to minimize delays and support onboard placement.*

Keywords: *Certificate Issuance; Crew Document Verification; Crew On Board; Crewing Agency; Marshall Island Certificate.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur penerbitan sertifikat Marshall Island, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta menentukan upaya perusahaan dalam mengatasi hambatan tersebut guna memastikan kelancaran penempatan awak kapal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi di PT Korin Global Mandiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penerbitan sertifikat Marshall Island dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu perekrutan awak kapal, pengumpulan dokumen, verifikasi dokumen, pemilihan formulir (MI-105 untuk perwira dan MI-273 untuk *rating*), pengisian formulir, pengunggahan dokumen ke sistem International Registries Inc. (IRI), verifikasi oleh Republic of the Marshall Islands (RMI), dan penerbitan sertifikat. Hambatan utama yang teridentifikasi meliputi ketidaklengkapan dokumen awak kapal, ketidaksesuaian data identitas, keterlambatan dalam pemrosesan dokumen, serta kurangnya kedisiplinan awak kapal dalam menyerahkan dokumen. Untuk mengatasi masalah tersebut, perusahaan melakukan pemeriksaan ulang dokumen, berkoordinasi secara intensif dengan awak kapal, memberikan pengingat penyerahan dokumen, serta memantau proses sertifikasi guna meminimalkan keterlambatan dan mendukung kelancaran penempatan awak kapal.

Kata kunci: *Crew on Board*; *Crewing Agency*; Penerbitan Sertifikat; Sertifikat Marshall Island; Verifikasi Dokumen Crew.

1. PENDAHULUAN

Sertifikat dalam pelayaran adalah dokumen resmi yang diberikan kepada seseorang yang telah menyelesaikan pelatihan dan kualifikasi tertentu dalam industri pelayaran. Sertifikat ini menunjukkan bahwa pemiliknya memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan tugas di atas kapal, seperti navigasi, keamanan, keselamatan, dan kesehatan. Sertifikat dalam pelayaran juga dipersyaratkan untuk memenuhi standar internasional dan peraturan pemerintah dalam industri pelayaran baik dalam lingkup pelayaran dalam negeri maupun luar negri dengan masa berlaku lima tahun setelah dokumen pelaut tersebut rilis.

Naskah Masuk: 16 April 2026; Revisi: 20 Mei 2026; Diterima: 27 Juni 2026; Terbit: 30 Juni 2026

PT. Korin Global Mandiri, sebagai salah satu perusahaan manning agency di Indonesia, memiliki banyak kapal dengan bendera kapal yang berbeda-beda diantaranya bendera Korea, Panama, Marshall Island dan Liberia. Untuk itu, selain sertifikat Kepelautan, sertifikat STCW dan sertifikat kesehatan, crew juga diwajibkan memiliki sertifikat bendera kapal. Sertifikat bendera kapal, merupakan sertifikat yang diwajibkan dimiliki oleh crew ketika sudah bekerja di kapal. Sertifikat tersebut hanya dapat dibuatkan oleh perusahaan dimana crew tersebut bekerja.

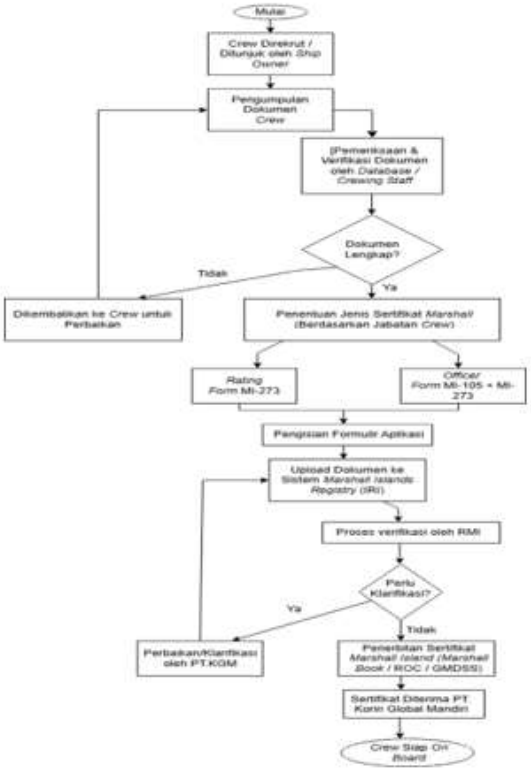
Dalam setiap proses penerbitan sertifikat Marshall Island sering mengalami berbagai hambatan seperti ketidaksiapan atau ketidaklengkapan dokumen crew saat pengajuan sertifikat, perbedaan atau ketidaksesuaian data administrasi crew pada dokumen pendukung, kurangnya pemahaman dan kedisiplinan crew dalam memenuhi persyaratan sertifikasi Marshall Islands.Hambatan tersebut berdampak langsung pada keterlambatan keberangkatan crew, penolakan dokumen oleh principal, dan terganggunya jadwal operasional kapal serta berpotensi menurunkan kredibilitas perusahaan di mata ship owner. Menurut laporan International Chamber of Shipping (ICS, 2023), keterlambatan sertifikasi pelaut merupakan salah satu faktor penyebab terhambatnya pergantian crew di kapal-kapal berbendera internasional. Di sisi lain, tekanan global terhadap transparansi dan digitalisasi dokumen pelaut semakin meningkat.

2. METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengkaji proses penerbitan sertifikat Marshall Island bagi pelaut yang akan ditempatkan di atas kapal. Fokus penelitian mencakup mekanisme pengajuan sertifikat, peran crew on board, serta berbagai kendala yang muncul selama proses administrasi. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dengan staf perusahaan dan awak kapal, penelaahan dokumen terkait, serta kajian literatur yang relevan. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan membandingkan temuan lapangan terhadap konsep dan regulasi yang berlaku sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan penerbitan sertifikat Marshall Island.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Penerbitan Sertifikat Kapal Berbendera Marshall Island di PT. Korin Global Mandiri



Gambar 1. Flow Chart Proses Penerbitan Sertifikat Marshall Island.

Sumber: PT. Korin Global Mandiri.

Dalam pelaksanaannya, perusahaan harus memastikan bahwa crew yang akan diproses benar-benar telah dipilih sesuai kebutuhan kapal dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan jabatan yang akan ditempati. Selain itu, tahap awal ini juga menjadi waktu bagi perusahaan untuk mempersiapkan jadwal keberangkatan crew agar proses administrasi dapat selesai sebelum crew naik ke kapal. Tahapan dalam proses penerbitan Sertifikat Marshall Island dilakukan melalui beberapa Langkah sebagai sebagai berikut

Perekrutan dan Penunjukan Crew

Tahap awal dalam proses ini adalah crew direkrut atau ditunjuk langsung oleh pihak ship owner berdasarkan kebutuhan operasional kapal. Proses perekrutan biasanya mempertimbangkan pengalaman kerja, kemampuan, sertifikat kompetensi, serta jabatan yang dibutuhkan di atas kapal.

Pengumpulan Dokumen Persyaratan

Setelah crew ditetapkan, tahap berikutnya adalah pengumpulan dokumen persyaratan dari masing-masing crew. Dokumen yang dikumpulkan meliputi paspor, buku pelaut, sertifikat

BST, sertifikat keahlian, ijazah, sertifikat jabatan, serta dokumen pendukung lainnya sesuai kebutuhan perusahaan dan ketentuan Marshall Island.

Verifikasi dan Pemeriksaan Dokumen

Dokumen yang telah diterima kemudian diperiksa dan diverifikasi oleh database staff atau crewing staff perusahaan. Pemeriksaan dilakukan secara detail untuk memastikan bahwa seluruh dokumen lengkap, valid, dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Republic of the Marshall Islands (RMI).

Penentuan Jenis Sertifikat Marshal Island

Dokumen dinyatakan lengkap, pihak perusahaan menentukan jenis sertifikat Marshall Island yang akan diajukan sesuai jabatan crew di atas kapal. Penentuan ini dilakukan karena setiap jabatan memiliki jenis sertifikat dan formulir yang berbeda. Crew dengan jabatan officer biasanya memerlukan persyaratan yang lebih lengkap dibandingkan crew dengan jabatan rating.

Hambatan dalam Proses Penerbitan Sertifikat Kapal Berbendera Marshall Island

Dalam pelaksanaannya, proses penerbitan sertifikat kapal berbendera Marshall Island di PT. Korin Global Mandiri tidak selalu berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana operasional yang telah ditetapkan. Meskipun perusahaan telah memiliki prosedur kerja yang sistematis dan terstruktur, pada praktiknya masih terdapat berbagai hambatan yang dapat mempengaruhi kecepatan, ketepatan, serta efektivitas dalam proses penerbitan sertifikat crew on board. Hambatan-hambatan tersebut muncul baik dari faktor internal perusahaan maupun faktor eksternal yang berkaitan dengan crew, sistem administrasi, serta ketentuan dari pihak flag state (Marshall Islands Registry).

Dokumen crew tidak lengkap saat pengajuan

Salah satu hambatan utama yang sering terjadi dalam proses penerbitan sertifikat adalah ketidaklengkapan dokumen yang diserahkan oleh crew pada saat pengajuan dilakukan. Dokumen yang wajib dilampirkan dalam proses ini meliputi paspor, buku pelaut, sertifikat keahlian (Certificate of Competency/COC), sertifikat keterampilan (Certificate of Proficiency/COP), serta sertifikat kesehatan (medical certificate).

Ketidaksesuaian data administrasi crew pada dokumen pendukung

Ketidaksesuaian data identitas crew juga menjadi salah satu hambatan yang cukup sering terjadi dalam proses administrasi. Ketidaksesuaian data dapat berupa perbedaan ejaan nama, tempat dan tanggal lahir, nomor paspor, maupun nomor sertifikat antara satu dokumen dengan dokumen lainnya.

Keterlambatan dan tingkat kedisiplinan crew dalam pengumpulan dokumen

Hambatan berikutnya yang dihadapi dalam proses penerbitan sertifikat Marshall Island di PT. Korin Global Mandiri adalah keterlambatan dan rendahnya tingkat kedisiplinan sebagian crew dalam pengumpulan serta pengelolaan dokumen yang menjadi persyaratan pengajuan sertifikat. Kondisi ini umumnya terjadi karena crew masih berada di atas kapal, sedang menjalani masa kontrak kerja, atau mengalami keterbatasan akses komunikasi sehingga proses pengiriman dokumen kepada perusahaan menjadi terlambat.

Upaya PT. Korin Global Mandiri dalam Mengatasi Hambatan

Dalam menghadapi berbagai hambatan yang muncul pada proses pengurusan sertifikat kapal berbendera Marshall Island, PT. Korin Global Mandiri telah melakukan sejumlah upaya strategis yang bersifat sistematis dan berkelanjutan. Upaya-upaya tersebut tidak hanya difokuskan pada penyelesaian masalah yang terjadi, tetapi juga diarahkan untuk mencegah terjadinya permasalahan serupa di masa yang akan datang. Secara umum, langkah yang dilakukan perusahaan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas administrasi, memperkuat koordinasi antarbagian, meningkatkan kedisiplinan crew, serta memastikan seluruh proses pengajuan sertifikat berjalan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku dari Marshall Islands Registry.

Penerapan Checklist Dokumen Crew

Salah satu upaya utama yang dilakukan perusahaan adalah penerapan sistem checklist dokumen crew secara lebih terstruktur dan terstandarisasi. Checklist ini berfungsi sebagai alat kontrol internal untuk memastikan bahwa seluruh dokumen yang dipersyaratkan telah lengkap, valid, dan sesuai sebelum diajukan ke pihak registry Marshall Islands.

Peningkatan Koordinasi Internal Antarbagian

Upaya berikutnya yang dilakukan oleh PT. Korin Global Mandiri adalah peningkatan koordinasi internal antar divisi yang terlibat dalam proses pengurusan sertifikat, khususnya antara crewing manager, database staff, operational staff, dan bagian terkait lainnya.

Pemberian Edukasi kepada Crew

Selain perbaikan dari sisi internal perusahaan, PT. Korin Global Mandiri juga memberikan perhatian khusus terhadap peningkatan pemahaman dan kesadaran crew melalui program edukasi. Edukasi ini diberikan dalam bentuk pengarahan, sosialisasi, maupun komunikasi langsung terkait pentingnya kelengkapan dokumen dan ketepatan data administrasi.

Koordinasi dengan Pihak Registry

Upaya penting lainnya yang dilakukan oleh PT. Korin Global Mandiri adalah menjalin koordinasi aktif dengan pihak Marshall Islands Registry. Koordinasi ini merupakan bagian penting dalam memastikan proses pengajuan sertifikat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta untuk memperoleh informasi terbaru terkait persyaratan dan prosedur administrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur yang diterapkan perusahaan telah sesuai dengan teori administrasi pelayaran yang menekankan ketelitian data, keabsahan dokumen, dan kepatuhan terhadap regulasi flag state. Formulir MI-105 digunakan untuk endorsement officer, sedangkan MI-273 digunakan untuk identitas pelaut dan sertifikasi SIRB. Penerapan kedua formulir tersebut telah sesuai dengan ketentuan Marshall Islands Registry.

Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa hambatan, yaitu ketidaklengkapan dokumen, keterlambatan pengumpulan dokumen, ketidaksesuaian data identitas crew, kesalahan input data, serta kurangnya pemahaman crew terhadap prosedur administrasi internasional. Hambatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi faktor administratif, faktor sumber daya manusia, dan faktor eksternal berupa keterlambatan verifikasi pada sistem registry.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, PT. Korin Global Mandiri menerapkan checklist dokumen, meningkatkan koordinasi antar divisi, serta memberikan edukasi kepada crew mengenai pentingnya validitas dokumen dan kepatuhan terhadap regulasi internasional. Upaya tersebut merupakan bentuk pengendalian internal yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses sertifikasi.

Secara keseluruhan, PT. Korin Global Mandiri telah menjalankan proses penerbitan sertifikat Marshall Island sesuai standar internasional. Keberhasilan proses tersebut dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu kepatuhan terhadap regulasi, kualitas sumber daya manusia, dan efektivitas sistem administrasi. Oleh karena itu, peningkatan manajemen dokumen, digitalisasi sistem, dan penguatan koordinasi internal perlu terus dilakukan untuk mendukung kelancaran proses crew on board di masa mendatang

4. KESIMPULAN

Prosedur penerbitan sertifikat Marshall Island di PT. Korin Global Mandiri telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Republic of the Marshall Islands Maritime Administrator. Proses tersebut dilakukan melalui tahapan yang jelas, yaitu persiapan dokumen

crew, pengajuan melalui sistem International Registries, Inc. (IRI), verifikasi oleh Marshall Islands Registry, hingga penerbitan sertifikat sebagai persyaratan crew on board.

Hambatan yang dihadapi dalam proses penerbitan sertifikat Marshall Island terutama disebabkan oleh ketidaksiapan dan dokumen crew, perbedaan data administrasi, serta keterbatasan pemahaman crew terhadap persyaratan sertifikasi Marshall Islands. Selain itu, faktor teknis seperti waktu verifikasi dari pihak registry juga memengaruhi lamanya proses penerbitan sertifikat.

Upaya yang dilakukan PT. Korin Global Mandiri dalam mengatasi hambatan proses penerbitan sertifikat Marshall Island meliputi pengecekan dokumen sebelum pengajuan, peningkatan koordinasi internal antarbagian, monitoring masa berlaku dokumen crew, serta komunikasi aktif dengan pihak registry. Selain itu, berdasarkan hasil analisis penelitian, diperlukan penerapan mitigasi risiko pada setiap tahapan proses penerbitan sertifikat, mulai dari perekrutan crew, pengumpulan dan verifikasi dokumen, pengisian formulir, pengunggahan dokumen ke sistem IRI, hingga penerbitan sertifikat. Penerapan mitigasi tersebut diharapkan dapat mengurangi kesalahan administrasi, meminimalkan keterlambatan proses, serta meningkatkan efektivitas penerbitan sertifikat Marshall Island.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyatakan rasa terima kasih yang sebesar- besarnya kepada para pembimbingnya, Jumriani, S.E., M.Adm,S.D.A dan Dr. Abdul Rahman, S.Pd., M.Si. atas bimbingan, support, serta masukan mereka sepanjang proses penelitian. Dia pula mengantarkan rasa terima kasihnya kepada rekan- rekannya yang sudah membagikan dorongan serta support, sehingga mengizinkan keberhasilan penyelesaian penelitian ini.

REFERENSI

Amanda, P., Dirhamsyah, D., & Fransiska, E. (2025). Pengurusan sertifikat minimum safe manning MT. Mumbai melalui aplikasi SIMKAPEL oleh PT. Multi Jaya Samudera Belawan. *Jurnal Transformasi Bisnis Digital*, *2*(6), 34–42. https://doi.org/10.61132/jutrabidi.v2i6.1041

Amanto, A., Bintari, P. N., & Setyawan, Y. (2023). Analisis keterlambatan pergantian awak kapal di PT Samudera Daya Maritim. *E-Journal Marine Inside*, *5*(2), 24–30. https://doi.org/10.62391/ejmi.v5i2.68

Amiliya, R., Solehah, I., Wati, I., Amin, M. F. G., & Musaddad, A. (2025). Urgensi digitalisasi sertifikat: Perlindungan hukum dan tanggung jawab dalam jaminan hipotik kapal laut. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, *5*(1), 210–219. https://doi.org/10.56393/nomos.v5i1.3112

Anshori, D. F. R., Rahayu, T., Puspitacandri, A., & Dahri, M. K. (2025). Peran strategis agen crewing dalam mendukung operasional pelayaran. *RIGGS Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 4*(2), 3070–3074. https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.976

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. (2024). *Program diklat dan sertifikasi pelaut*. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. https://bp3ip.ac.id

Baumler, R., Bhatia, B. S., & Kitada, M. (2021). Ship first: Seafarers' adjustment of records on work and rest hours. *Marine Policy, 130*, 104186. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.104186

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. (2023). *Data pelaut Indonesia terdaftar tahun 2023*. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Hanik, K., Papuantya, S., & Maharani, A. (2024). Analisis proses replacement crew kapal dan ketidaksesuaian jadwal keberangkatan pengiriman crew sign on. *Majalah Ilmiah Bahari Jogja, 22*(2), 184–201. https://doi.org/10.33489/mibj.v22i2.372

International Chamber of Shipping. (2023). *Shipping industry guidance on the Maritime Labour Convention*. International Chamber of Shipping.

International Labour Organization. (2006). *Maritime Labour Convention, 2006, as amended (MLC, 2006)*.

International Maritime Organization. (1974). *International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974, as amended*.

International Maritime Organization. (1978). *International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978*.

International Maritime Organization. (2017). *International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), including 2010 Manila Amendments*.

International Maritime Organization. (2018). *International Safety Management (ISM) Code and guidelines on implementation of the ISM Code*.

International Registries, Inc. (2023). *Republic of the Marshall Islands maritime regulations*. Republic of the Marshall Islands Maritime Administrator.

International Registries, Inc. (2024). *Seafarer certification requirements*. Republic of the Marshall Islands Maritime Administrator.

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran*. Pemerintah Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran*. Pemerintah Republik Indonesia.